

Nomor : 26 /DP-DPK-BPJSTK /11-2022
Lampiran :

3 November 2022

Kepada Yth.

Pengurus
Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

di-
JAKARTA

Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Dewan Pengawas

Sebagai tindak lanjut Rapat Dewan Pengawas DPK BPJS Ketenagakerjaan, bersama ini di sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dewan Pengawas menyetujui penunjukan KAP.Teguh, Heru & Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan DPK BPJS Ketenagakerjaan Tahun Buku 2022, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Pemahaman proses bisnis yang sudah memadai di Industri Dana Pensiun.
 - b. KAP tersebut berpengalaman melakukan audit Dana Pensiun.
 - c. Memiliki Sertifikat Standar Profesi Pasar Modal, Sertifikat Terdaftar di Bank Indonesia sebagai Auditor Bank dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyedia jasa Industri Keuangan Non-Bank.
 - d. Biaya jasa audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 sebesar Rp 90.000.000,- sudah termasuk PPN 10% masih dibawah anggaran sebesar Rp 100.000.000,-
 - e. KAP Teguh, Heru & Rekan terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional Abacus Word Wide.
2. Penunjukan KAP.Teguh, Heru & Rekan didukung dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. Kesesuaian Pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik dengan Sistem Operasional Pengadaan Jasa.
 - b. Surat Penawaran Jasa Kantor Akuntan Publik.
 - c. Bukti persyaratan Kantor Akuntan Publik terdaftar di INKB dan tidak ada permasalahan hukum dalam 3 (tiga) Tahun baik di OJK dan BPK.
 - d. Evaluasi penilaian teknis untuk penetapan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
3. Perubahan Struktur Organisasi Dana Pensiun, Dewan Pengawas memberikan rekomendasi persetujuan atas usulan perubahan tersebut, dengan catatan yaitu :
 - a. Telah memenuhi ketentuan Penerapan Manajemen Risiko Dana Pensiun yaitu pembentukan komite pemantau risiko.

Kantor :

Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan Jl. Tangkas Baru No. 1, Komplek Polri Gatot Subroto, Jakarta 12930, Telp. (021) 520 4362, 525 4880
Fax. (021) 522 8530, E-mail : dpk-bpjstk@cbn.net.id | Website : <http://www.dpkbpjs-ketenagakerjaan.co.id>

- b. Pencantuman Fungsi atau Komite yang dijalankan Anggota Dewan Pengawas yaitu Fungsi Remenurasi dan Nominasi, Fungsi Audit dan Komite Pemantau Risiko dari Anggota Dewan Pengawas dan Pihak Lain.
 - c. Penambahan bagan (kolom) staff pada masing-masing bidang Kepesertaan dan Teknologi Informasi, Keuangan dan Investasi, SDM dan Umum.
 - d. Perampingan struktur organisasi berdampak pada efisiensi beban personil bagi karyawan DPK BPJS Ketenagakerjaan.
 - e. Efisiensi beban usaha Dana Pensiun, Rasio Beban Usaha (BOPO) maksimal sebesar 10%, yang didasari dari nilai rata-rata BOPO Industri Dana Pensiun sebesar 10%.
4. Hal yang perlu tindak lanjut Pengurus dalam usulan perubahan Struktur Organisasi yaitu :
- a. Perubahan struktur organisasi selanjutnya akan diikuti dengan pembuatan :
 - 1) Job Title
 - 2) Job Descriptions
 - b. Untuk mendukung pelaksanaan dalam Struktur Organisasi perlu dibuatkan Pedoman Tata Kelola Remunerasi Dana Pensiun sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Perubahan Struktur Organisasi berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Dana Pensiun, Manajemen Risiko Dana Pensiun dan Sistem Teknologi Informasi Dana Pensiun.
5. Pemberian tunjangan kinerja tahun 2022 tidak dapat disetujui dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a. Kewajaran dan objektifitas pemberian tunjangan kinerja yang dilakukan pada periode berjalan tahun 2022.
 - b. Proyeksi kinerja keuangan tahun 2022, Rasio Kecukupan Dana, Rasio Hasil Investasi menunjukkan tidak tercapai dari target Rencana Bisnis Tahun 2022.
 - c. Pencapaian kinerja keuangan tahun 2022 tercermin dari Laporan Keuangan setelah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik
6. Pemberian tunjangan kinerja perlu dilengkapi dengan penyusunan parameter sebagai ukuran atas pencapaian kinerja dalam 1 (satu) tahun.
7. Asumsi tingkat aktuarial yang saat ini sebesar 8,50% masih layak digunakan dengan pertimbangan trend tingkat bunga yang naik sehingga target imbal hasil sebesar 8,50% per tahun dapat dicapai.

Kantor :

Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan Jl. Tangkas Baru No. 1, Komplek Polri Gatot Subroto, Jakarta 12930, Telp. (021) 520 4362, 525 4880
Fax. (021) 522 8530, E-mail : dpk-bpjstk@cbn.net.id | Website : <http://www.dpkbpjs-ketenagakerjaan.co.id>

8. Kajian perubahan asumsi tingkat aktuarial sebesar 8,50% menjadi sebesar 8,25% dan sebesar 8,00% dijadikan agenda periodik untuk pemantauan atas kesesuaian tingkat bunga aktuarial dengan pencapaian tingkat hasil investasi.
9. Realisasi pembayaran manfaat pensiun yang ditangguhkan atas nama Bapak Amri Yusuf dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2022.
10. Perlu dilakukan pembahasan antara Pengurus dan Dewan Pengawas tentang perkembangan anak perusahaan Dana Pensiun yaitu PT.Nayaka Era Husada dan PT.Samundranayaka Grahaunggul.

Demikian disampaikan hasil Rapat Dewan Pengawas untuk dapat ditindak lanjuti, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

DEWAN PENGAWAS



Arif Zahari
Ketua

DPK BPJS
Ketenagakerjaan

Kantor :

Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan Jl. Tangkas Baru No. 1, Komplek Polri Gatot Subroto, Jakarta 12930, Telp. (021) 520 4362, 525 4880
Fax. (021) 522 8530, E-mail : dpk-bpjsk@cbn.net.id | Website : <http://www.dpkbpjs-ketenagakerjaan.co.id>